

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan negara yang memberikan kontribusi besar dalam membiayai kebutuhan belanja dan pembangunan nasional. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja dan pembangunan nasional dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup besar. Ketersediaan dana dapat diperoleh dari pemerintah pusat dan daerah melalui pemungutan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2011) Pajak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pajak pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM), dan Bea Materai. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Dalam Pemungutan pajak, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomian sendiri agar dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan perekonomian dan pembangunannya masing masing. Salah satu sumber utama untuk membiayai kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah yaitu melalui pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan/atau penguasaan kendaraan Bermotor. PKB merupakan pajak daerah provinsi yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar kedua dalam meningkatkan laju perekonomian daerah, pembangunan daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk meningkatkan lajunya perekonomian daerah, pembangunan daerah dan PAD, PKB diharapkan dapat meningkat setiap tahun. Namun, hal ini tidak sejalan dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah, karena masih banyaknya masyarakat yang menunggak dalam membayar PKB. Tunggakan pajak adalah

angsuran yang belum dibayarkan atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal jatuh tempo (Hoetomo, 2005). Jumlah tunggakan PKB ini akan mengurangi dan menurunkan potensi pendapatan daerah yang dapat menghambat lajunya perekonomian dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor cabang pendapatan Kota Bekasi, Jumlah Tunggakan PKB atau yang disebut dengan Jumlah Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 Sebesar 1.500.000 dan terdapat 72% kendaraan roda dua dan sisanya kendaraan roda empat. Menurut persentasenya terdapat sekitar 53,85% Masyarakat Kota Bekasi yang masih menunggak dalam membayar PKB. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menjadi salah satu factor penerimaan pajak kendaraan masih di bawah 50%. Masih ada kurang lebih 523.000 pemilik kendaraan atau wajib pajak yang belum melakukan daftar ulang. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/21/16085211/realisasi-target-pajak-kendaraan-bermotor-kota-bekasi-baru-capai-46>)

Berdasarkan data dari SAMSAT Bekasi, pajak kendaraan roda empat sebesar Rp.2.000.000 – Rp. 2.500.000, Sedangkan Kendaraan roda dua sebesar Rp. 200.000 – Rp. 400.000. Tahun ini pihak SAMSAT menargetkan pendapatan pajak kendaraan sebesar Rp.1.400.000.000.000. dan untuk mencapai ditargetkan yang diharapkan, pihak SAMSAT melakukan upaya dengan cara memaksa penunggakan pajak untuk segera melakukan pembayaran. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menjemput bola maupun razia terpadu bersama dengan aparat kepolisian. Untuk mendapatkan target dan realisasi pajak kendaraan, diperlukan juga dukungan dan kerjasama dari masyarakat atau wajib pajak yang memiliki kendaraan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu. Namun, hal ini sering tidak sejalan dengan yang sudah diharapkan, faktanya masih banyak wajib pajak atau masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang menunda nunda dalam membayar PKB sehingga dapat menimbulkan tunggakan PKB.

Tunggakan PKB ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan PKB yang pertama adalah kesadaran. Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik

seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran merupakan faktor yang penting dalam melakukan suatu kegiatan terutama dalam membayar pajak. Karena tanpa ada kesadaran diri sendiri, maka sulit bagi seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak khususnya PKB. Selain itu ada sebagian masyarakat atau wajib pajak yang tidak sadar atau lupa dan kapan waktu pembayaran PKB. Hal ini jika dilakukan secara terus menerus menyebabkan jumlah tunggakan PKB meningkat setiap tahunnya. Sehingga, ada asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka jumlah tunggakan PKB akan menurun dan sebaliknya.

Beberapa Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian yang berbeda beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo et al., 2022) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap jumlah tunggakan wajib pajak. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani & Subadriyah, 2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap jumlah tunggakan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Viralaohgmailcom, 2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap jumlah tunggakan pajak

Ada yang sadar atas kewajiban dalam membayar pajak, tetapi kondisi keuangan dan pendapatan yang diterima wajib pajak tidak cukup untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Faktor kedua yang mempengaruhi jumlah tunggakan PKB adalah pendapatan. Menurut (Farandy, 2018) pendapatan dalam hal pemungutan pajak kepada seseorang tentu harus melihat kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak salah satunya dilihat dari kondisi keuangan atau tingkat pendapatan seseorang. Karena Tingkat pendapatan yang dimiliki setiap wajib pajak berbeda – beda, hal ini dapat mempengaruhi perhatian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Pendapatan yang diterima wajib pajak tinggi, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban membayar pajak. Dan sebaliknya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak rendah, maka wajib pajak akan sering menunda-nunda

dan pada akhirnya menunggak membayar pajak. Jika dilakukan secara terus-menerus jumlah tunggakan PKB akan terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut penelitian yang dilakukan (Faizah, 2009), seseorang yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi akan lebih terpenuhi kewajiban membayar pajaknya, dan sebaliknya seseorang yang memiliki pendapatan rendah akan memprioritaskan untuk membiayai pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan kewajiban membayar pajak. Hal ini akan mempengaruhi jumlah tunggakan pajak, khususnya PKB bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Rukmana, 2013) yang menyatakan pendapatan berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak. Begitu juga hasil penelitian oleh (Daerah et al., 2013) menyatakan pendapatan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2019) yang menyatakan pendapatan berpengaruh negatif pada jumlah tunggakan wajib pajak.

Selain itu, tidak hanya pendapatan yang dapat mempengaruhi jumlah tunggakan PKB, factor kualitas pelayanan juga dapat mempengaruhi jumlah tunggakan PKB adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini sangat berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pelayanan yang baik, ramah, nyaman, cepat dan mudah dimengerti, dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan PKB. Dan sebaliknya, pelayanan yang kurang baik, tidak ramah terbelit-belit dan tidak dapat dimengerti, dan dapat mengurangi kemauan wajib pajak dan membuat wajib pajak malas untuk membayar pajak, hal ini akan menyebabkan jumlah tunggakan PKB meningkat. Menurut (Supadmi, 2009) pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak,

tersediannya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Semakin baik dan memuaskan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas, semakin tinggi pula tingkat partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga jumlah tunggakan PKB mengalami penurunan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo et al., 2022) yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak begitu juga hasil penelitian oleh (Daerah et al., 2013) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Viralaohgmailcom, 2023) yang menyatakan berpengaruh negatif terhadap jumlah tunggakan pajak.

Selain kesadaran, pendapatan dan kualitas pelayanan. Menurut (Wibowo et al., 2022) yang mempengaruhi jumlah tunggakan PKB pengetahuan wajib pajak, pentingnya dalam hal untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak sulit untuk mengerti dan memahami tata cara pembayaran pajak. Faktor keempat yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak adalah pengetahuan. Adanya ilmu pengetahuan dapat membuat seseorang yang awalnya tidak mengerti. Dibutuhkan proses yang lama dan luas untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak. Pengetahuan serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dan peraturan pajak, bisa didapat wajib pajak dengan berbagai cara, seperti pengalaman dari orang lain yang pernah membayar pajak, mencari diinternet. Pengetahuan perpajakan suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Ramadhani & Wilestari, 2020)

Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyaun, 2017) menyatakan pengetahuan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Febrian & Ristiliana, 2019) menyatakan pengetahuan berpengaruh positif terhadap jumlah tunggakan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widajantie et al., 2019) yang menyatakan pengetahuan berpengaruh negatif terhadap jumlah tunggakan pajak.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas terdapat juga adanya faktor Covid-19 telah mewabah dan sudah memakan terlalu banyak korban jiwa. Satu tahun berselang dan pandemi tidak menunjukkan tanda-tandanya untuk berakhir. Norma kebiasaan dan kegiatan kita sehari-hari telah diubah sedemikian rupa agar masyarakat dapat tetap bertahan menghadapi wabah ini. Berbagai aspek dalam kehidupan terdampak akibat dari melandanya virus ini, khususnya pada sektor perekonomian. Hadirnya pandemi membuat masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah. Alhasil, kegiatan perekonomian juga terhambat, apalagi di kalangan pengusaha kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasca Indonesia terkena covid-19 kondisi perekonomian tidak stabil sehingga dimungkinkan banyak penunggakan pajak yang menyebabkan pendapatan pajak menurun (<https://pajak.go.id>).

Berdasarkan uraian diatas fenomena diatas, terkait dengan penunggakan (PKB) terdapat penelitian penelitian yang menunjukkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permasalahan penunggakan (PKB). Akan tetapi belum ada konsistensi hasil penelitian dari variabel yang diteliti terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti akan menguji kembali hasil tersebut dengan kesadaran, pendapatan, kualitas pelayanan dan pengetahuan sebagai variabel. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menelaah dampak yang ditimbulkan. Maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Determinan Jumlah Tunggakan Pajak kendaraan Bermotor (PKB)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan pajak

kendaraan bermotor agar masyarakat sadar, patuh dan tidak lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, pembelajaran, dan bahan perbandingan bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang sama dalam bidang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga dapat menambah referensi dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pemerintah atau Pihak-Pihak yang Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang baik bagi cabang pelayanan pendapatan Daerah Provinsi wilayah kota Bekasi dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan tepat waktu sehingga jumlah tunggakan pajak khususnya Pajak kendaraan bermotor (PKB) meningkat setiap Tahunnya.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya pelebaran dari pokok masalah. Hal ini dilakukan agar penelitian tersebut lebih terarah sehingga memudahkan pembahasan tujuan penelitian yang akan dicapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar di Samsat Bekasi. Sehingga hasil analisis yang di dapat hanya berlaku pada di Samsat Bekasi.
2. Teknik pengumpulan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel *accidental sampling* sehingga waktu pengambilan sampel dibatasi karena adanya faktor keterbatasan biaya dan waktu yang dimiliki.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan menelaah penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan Sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memberikan penjelasan terkait teori-teori yang mendasari penelitian yang terdiri dari penjelasan kesadaran wajib pajak, pendapatn, kualitas pelayanan, pengetahuan, tunggakan pajak. Dan penelitian terdahulu yang berhubungan, kerangka pemikiran, serta hipotesis pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penelitian, sampel, populasi, jenis dan sumber data yang diperoleh, variabel penelitian, metode analisis data dengan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang ruang lingkup, penentuan sampel, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berupa penyajian secara singkat dari hasil yang diperoleh dan saran yang merupakan kekurangan dari dari indikator-indikator permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yang kemudian kemungkinan dikembangkan oleh penelitian-penelitian selanjutnya.